

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA PADA TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2015

T. Fahrurriza Putrayuda¹⁾
Yulia Efni²⁾
Kamaliah³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau
^{2),3)} Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau

Abstract. *This study aims to determine the effect of Earning Influence Income (PAD), (PAD), General Allocation Fund (DAU), Profit Share Fund (DBH), Capital Expenditure, and Economic Growth on Poverty Rate through Economic Growth at Regency / City in Riau Province 2011-2015 . The study was conducted for 2 months, from October to December 2016.*

The object of this study is the district / city in Riau Province, the population and sample used in this study are 12 districts / municipalities in Riau Province. The data used are secondary data obtained based on documentation of the results of BPS publication (Central Bureau of Statistics) for data on Economic Growth and Poverty Rate whereas data of Earning Influence Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), DBH and Capital Expenditure Obtained from the Financial Management Agency and Regional Asset (BPKAD) Riau Province. The analysis tool used is Path Analysis using Partial Least Square (PLS) method.

The result of the research indicates that Pendapatan Asli Daerah (PAD), Profit Sharing Fund (DBH), Capital Expenditure, and Economic Growth have a significant effect on Poverty Level directly. While the General Allocation Fund (DAU) has no significant effect on Poverty Rate directly. Indirectly through the Economic Growth of Local Original Income (PAD), Profit Sharing Fund (DBH) and Capital Expenditure have a significant effect on Poverty Level. While the General Allocation Fund (DAU) indirectly or through Economic Growth does not affect the Poverty Level. Economic Growth as an intervening variable plays an important role in increasing the influence of Local Revenue (PAD) and Capital Expenditure on Poverty Level, but has no role in increasing the influence on General Allocation Fund (DAU) and influence DBH.

Keywords: *Earning Influence Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Profit Sharing Fund (DBH), Capital Expenditure, and Economic Growth*

Pendahuluan

Terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan

pemerintah daerah berubah menjadi daerah otonom. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar

untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Peran pemerintah daerah menjadi sangat sentral dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerahnya, dimana salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya terhadap kebutuhan penduduk sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya dapat menekan tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Jolianis, 2016). Permasalahan kemiskinan, terjadi di setiap daerah di Indonesia, termasuk di 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki angka kemiskinan yang paling tinggi di Provinsi Riau jumlah penduduk miskinnya selama lima tahun terakhir rata-rata berjumlah 64,36 ribu jiwa atau 35,61%.

Menurut Kuncoro (2013), masalah kemiskinan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB juga dapat menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah Belanja Daerah pada daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau Belanja Daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai Belanja Daerah yang dialokasikan

untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut akan meningkat yang pada akhirnya dapat mengatasi dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah itu sendiri (Nopirin, 2011). Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Nasution (2010), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada suatu daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal (BM), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, dan Tenaga Kerja.

Kenyataan yang terjadi dalam pemerintahan daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti oleh peningkatan Belanja Modal, hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan jumlah Belanja Pegawai (Kuncoro, 2013). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini Belanja Daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Sarangih (2012), menyatakan bahwa pemanfaatan Belanja Daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas

pembangunan yang berefek nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mulyanto (2007), Belanja Modal merupakan unsur dari Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan infrastruktur sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Sedangkan Menurut PP. No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengamatan awal ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan indikator PDRB-nya mengalami penurunan bahkan minus yang berbanding terbalik dengan PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal yang justru mengalami peningkatan serta persentase jumlah penduduk miskinnya yang juga cenderung meningkat sehingga menjadi menarik untuk diteliti bagaimana sebenarnya dan seberapa besar pengaruh dari keempat variabel tersebut (PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal) dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan pada 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Serta Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith (2008), kemiskinan yang terjadi akibat dari tingkat pendapatan nasional rendah, dan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi sehingga menyebabkan distribusi pendapatan menjadi sangat timpang dan tidak merata. Peran pemerintah dalam membangun infrastruktur dan sarana prasarana sangat dibutuhkan. Hal ini membutuhkan investasi yang besar yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Belanja Daerah yang salah satu sumber pembiayaannya bersumber dari PAD. Sebab dengan investasi, akan adanya infrastruktur dan sarana prasarana di daerah, masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya akan mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor

jasa, dan sektor-sektor lainnya. Jika terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2016) dan Meilen (2014), yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Apabila PAD mengalami peningkatan akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila PAD mengalami peningkatan akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin karena PAD yang diterima sebahagian dapat digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan sehingga dengan peningkatan jumlah PAD akan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis pertama yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan

Todaro dalam Nurmainah (2013), menyampaikan bahwa akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Sumber pendanaan tersebut dari Dana Perimbangan yang salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi

daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Disinilah peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah yang menerima DAU tersebut harus dapat mengoptimalkannya dalam pembiayaan operasional Pemerintahan Daerah dan sedapat mungkin juga dialokasikan untuk program pembangunan dan infrastruktur yang memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi yang tentunya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2016) dan Meilen (2014), yang juga menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Apabila DAU mengalami peningkatan akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini ini membuktikan bahwa peningkatan DAU diterima oleh pemerintah daerah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis kedua yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith (2008), kemiskinan yang terjadi dinegara-negara berkembang akibat dari interaksi tingkat pendapatan nasional rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya lambat hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Disilah peran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dana pemerataan. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*). Dana ini

dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Wahyuni dan Priyo (2009), menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi Belanja Daerah.

Sama halnya dengan DAU, adanya DBH juga dapat dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) adalah dilihat dari tujuan DBH yaitu untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Sehingga Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi Belanja Daerah. Dengan dialokasikannya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan dan program yang berkaitan dengan pembangunan dalam segala bidang diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianis (2016) dan Budi Santoso (2013), yang menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya sarana dan prasarana melalui peningkatan investasi infrastruktur serta tingkat pelayanan publik yang juga meningkat yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis ketiga yang dapat

dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H3 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

Terkait dengan teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), salah satu cara memutus lingkaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi dalam hal ini investasi pemerintah daerah melalui Belanja Modal. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2008), bahwa kemiskinan yang terjadi dinegara-negara berkembang akibat dari interaksi tingkat pendapatan nasional rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya lambat hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah melalui Belanja Modalnya.

Belanja Modal Pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah Belanja Modal Pemerintah Daerah dan *Produk Domestik Regional Bruto* memberi dampak positif terhadap penduduk miskin, karena ketersediaan infrastruktur yang memadai yang merupakan dampak positif dari peningkatan Belanja Modal Pemerintah Daerah akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat meningkat

sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendarmin (2012) dan Santi (2013), yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Belanja Modal Pemerintah Daerah walaupun tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis ketiga yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H4 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2008).

Menurut Budiono dalam Tarigan (2010), pertumbuhan ekonomi adalah “proses kenaikan out-put perkapita dalam jangka panjang. “Jadi, persentase pertambahan out-put itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam

jangka panjang pertumbuhan itu akan berlanjut. Sehingga secara sederhana pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan PDB/PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2010). Angka-angka PDRB tersebut sebagai indikator Ekonomi Makro dan juga sebagai landasan evaluasi terhadap kinerja perekonomian, dalam penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran dari aliran seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa (Nopirin, 2011).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga mempengaruhi angka kemiskinan, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja akan terbuka luas, sehingga tingkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2014), yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun hal ini berbeda dengan apa yang disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Santi (2013), yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitiannya berbeda dengan teori diatas karena kesimpulannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis kelima yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H5 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

PAD suatu daerah umumnya mencerminkan kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota ataupun Propinsi. Peningkatan PAD merupakan salah satu sumber pendanaan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Adi, 2012). Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai PAD, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kemakmuran penduduk.

Menurut Todaro dan Smith (2008), kemiskinan yang terjadi akibat dari tingkat pendapatan nasional rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya lambat. Adanya peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula alokasi Belanja Daerahnya (Ardhani dalam Wandira, 2013). Hal serupa juga diungkapkan oleh Brata (2008), bahwa peningkatan PAD diharapkan meningkatkan Belanja Daerah terutama untuk investasi Belanja Modal Pemerintah Daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Menurut McCulloch dan Sirait (2009), salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah

bahwa Pemerintah Daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tingkat kemiskinannya masih tergolong relatif tinggi dan oleh karenanya desentralisasi diharapkan akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Hartitik (2014) dan dengan penelitiannya tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011 menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikansi terhadap belanja Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah (2007), yang menyimpulkan bahwa secara tidak langsung PAD berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui melalui Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis keenam yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H6 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

7. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro dalam Nurmainah (2013), akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Sumber dana investasi tersebut salah satunya adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah

fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekonomi.

Dengan adanya proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2008). Untuk itu, pemerintah harus mampu mendorong dan memberdayakan seluruh komponen, khususnya sektor investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah). Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2014), tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menyimpulkan bahwa DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada belanja daerah. *World Bank* (2007), mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama sebagai sarana transportasi yang kesemuanya itu dapat menggerakkan roda perekonomian daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Menurut Simanullang (2013), penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis ketujuh yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H7 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

8. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu. Untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna pemerataan akibat adanya ketimpangan dan ketidak merataan distribusi pendapatan, yang menurut Todaro dan Smith (2008), kemiskinan yang terjadi akibat dari interaksi tingkat pendapatan nasional rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya lambat hal ini disebabkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata.

Peningkatan pendapatan daerah melalui DBH dan sumber-sumber lainnya sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan daerah. Besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan pada anggaran belanja daerah yang efektif dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang selanjutnya akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah-daerah di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah. Diharapkan dengan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada distribusi pendapatan yang berefek pada pengentasan kemiskinan.

Hal ini didukung oleh penelitian Yulianis (2016) dan Budi Santoso (2013), yang menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya sarana dan prasarana melalui peningkatan investasi infrastruktur serta tingkat pelayanan publik yang juga meningkat yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup

masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis kedelapan yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H8 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

9. Pengaruh Belanja Modal Melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional disuatu daerah, di antaranya adalah Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta. Dalam teorinya Keynes (1936) dalam (Tarigan, 2010) beranggapan bahwa pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah). Peran pemerintah daerah melalui pengeluaran belanja daerah yang dialokasikan dalam Belanja Modal merupakan implementasi bentuk investasi menurut teori Keynes. Belanja Modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah (Halim, 2008).

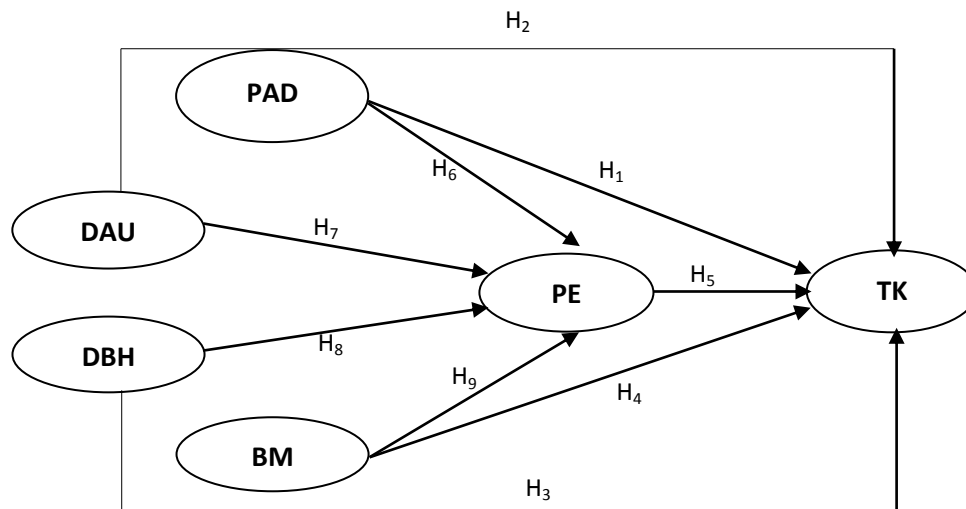
Belanja Modal Pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan

aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Belanja Modal Pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Santi (2013) dan Mawarni, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2013). Yang menyimpulkan bahwa bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap merunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis kedelapan yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H9 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Dari pengaruh antar variabel tersebut dapat digambarkan kedalam suatu model penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya pada Tingkat Kemiskinan dengan skematis seperti pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Penelitian ini dilaksanakan pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Objek penelitian ini pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, maka populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data historis yang diambil selama kurun waktu tahun 2011-2015. Data-data tersebut berupa data laporan realisasi APBD, yang diperoleh melalui dokumen publikasi laporan realisasi APBD atau laporan perhitungan APBD daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau melalui publikasi Statistik Keuangan Provinsi Riau tahun 2011 s/d 2015. Metode analisa yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan

menggunakan aplikasi *Warp-Partial Least Square* (Warp-PLS).

Langkah-langkah analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan Warp-PLS dapat dilihat pada uraian berikut (Ghozali, 2009), yaitu:

a. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Perancangan Model Struktural hubungan antar variabel laten didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian, yaitu:

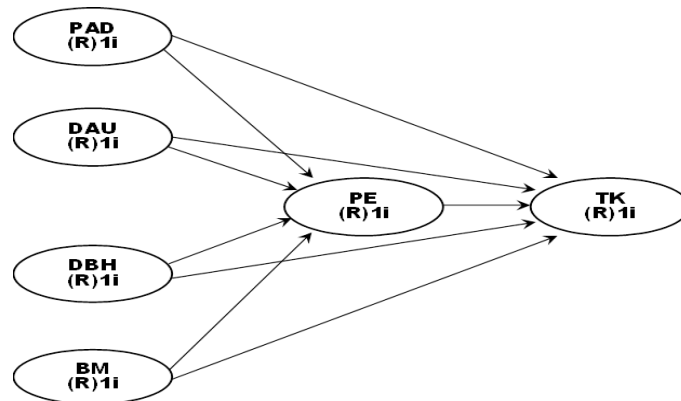
- 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal (BM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015.
- 2) Pengaruh tidak langsung antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal (BM) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015.

Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y1 = \rho_{X1Y1}X1 + \rho_{X2Y1}X2 + \rho_{X3Y1}X3 + \rho_{X4Y1}X4 + \rho_{eij} \dots \dots \dots (4.1)$$

$$Y2 = \rho_{X1Y2}X1 + \rho_{X2Y2}X2 + \rho_{X3Y2}X3 + \rho_{X4Y2}X4 + \rho_{Y1Y2}Y1 + eij \dots \dots \dots (4.2)$$

Model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian serta berbasis teori dan konsep, yang dapat diilustrasikan seperti Gambar 2 berikut :



Gambar 2 Diagram Jalur Variabel Penelitian

b. Pemeriksaan terhadap asumsi (*Outer Model*)

Langkah kedua dari analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. *Outer Model* atau Model Pengukuran mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Perancangan Model Pengukuran menentukan sifat indikator dari masing-masing variabel laten, apakah refleksif atau formatif, berdasarkan definisi operasional variabel.

c. Pendugaan parameter dan Hipotesis

Langkah ketiga di dalam analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) adalah pendugaan parameter atau koefisien *path*. Perhitungan koefisien pada gambar diagram persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa:

1. Untuk anak panah satu arah → digunakan perhitungan regresi variabel yang distandarkan, secara

parsial pada tiap-tiap persamaan. Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS), yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif (satu arah). Dari perhitungan ini diperoleh koefisien *path* pengaruh langsung.

2. Evaluasi *Goodness of Fit*

Goodness of Fit Model diukur menggunakan R^2 variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Q^2 *predictive relevance* untuk model struktural mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya dengan rumus sebagai berikut: $Q^2 = 1 - (1 - R1^2) (1 - R2^2)$. Besaran memiliki nilai dengan rentang $0 < Q^2 < 2$ pada analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS).

3. Langkah terakhir di dalam analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) adalah melakukan *interpretasi* hasil analisis yaitu menentukan jalur pengaruh yang signifikan dan mengidentifikasi jalur yang pengaruhnya lebih kuat yaitu dengan membandingkan besarnya koefisien jalur yang terstandar.

Uji hipotesis merupakan pembuktian statistik atas semua yang telah dihipotesiskan dalam penelitian berdasarkan teori. Pengujian Hipotesis dilakukan secara bertahap, dimana tahap :

1. Pertama adalah menguji pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal (BM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015.
2. Tahap kedua adalah menguji pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal (BM) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011-2015.

Menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai probabilitas (*p-value*). Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai alpha 5% atau 0,05. Sehingga kriteria penerimaan / penolakan Hipotesa adalah :

- H_0 diterima dan H_a ditolak ketika nilai probabilitas (*p-value*) < dari α (5%)

- H_a ditolak dan H_0 diterima ketika nilai probabilitas (*p-value*) > dari α (5%).

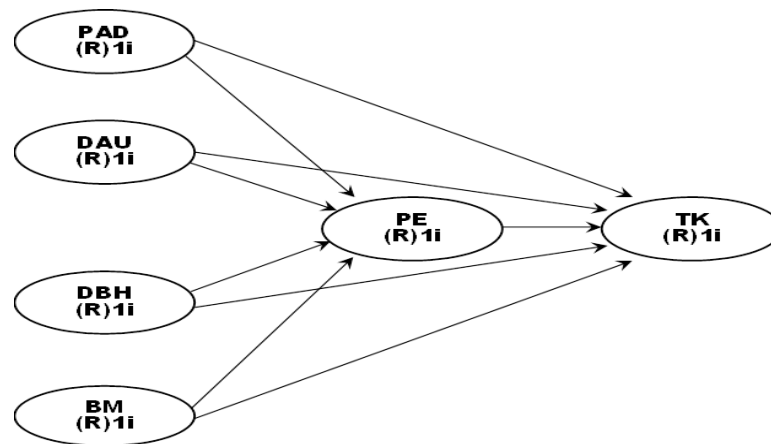
Hasil Analisis Penelitian :

1. Hasil Analisis Struktural *Partial Least Square* (PLS)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi *Warp-Partial Least Square* (PLS) dengan metode *bootstrapping* atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS. Selain terkait dengan normalitas data, dengan dilakukannya *bootstrapping* maka PLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel. Dikarenakan PLS berbasis pada *variance* maka jumlah sampel yang digunakan tidak perlu besar. Penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan PLS. Sampel yang digunakan dapat berkisar antara 30 – 100. Sedangkan dalam penelitian ini data sampel yang digunakan adalah sebanyak 60 sampel data. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural dengan pendekatan *Warp-Partial Least Square* (PLS). Sebelum menganalisis, terlebih dahulu dilakukan uji atau evaluasi model empiris penelitian. Hasil pengujian atau evaluasi model struktural yang dieksekusi dengan menggunakan Warp-PLS 5.0, dalam penelitian ini seperti pada Gambar 3 berikut :



Gambar 3 Model Analisis

b. Pemeriksaan Terhadap Asumsi (Outer Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan uji *Goodness of*

Fit Model struktural pada inner model menggunakan nilai *predictive-relevance* (Q^2).

Nilai R^2 tiap-tiap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE) = Y1 dan Tingkat Kemiskinan (TK) = Y2 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 Nilai R^2 Variabel Endogen

Variabel dependen	R-square
Pertumbuhan Ekonomi (PE) : (Y1)	-0,062
Tingkat Kemiskinan (TK) : (Y2)	0,409

Sumber: Olahan Data Penelitian Warp-PLS 5, 2017.

Penilaian *Goodness of fit* pada model PLS dapat diketahui dari nilai Q^2 . Nilai Q^2 memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (*R-square* / R^2) dalam analisis regresi. Semakin tinggi R^2 , maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai Q^2 dengan rumus sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2) (1 - R2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,062) (1 - 0,409)$$

$$Q^2 = 1 - 0,554358$$

$$Q^2 = 0,445642 \text{ pembulatan } 0,446.$$

Pada model penelitian ini nilai *R-square* total yang dihasilkan adalah sebesar 0,446 artinya besarnya prosentase pengaruh yang bisa dijelaskan model adalah sebesar 44.6%, sedangkan 55.4% sisanya adalah dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dikatakan layak dan memiliki nilai prediktif yang relevan karena nilai *Q-square* lebih besar dari 0,05 atau 5% menunjukkan model struktural memiliki *predictive relevance*.

c. Hasil Pendugaan Parameter dan Pengujian Hipotesis

Langkah ketiga di dalam analisis persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS) adalah pendugaan parameter atau koefisien *path*. Perhitungan koefisien persamaan struktural *Partial Least Square* (PLS)

dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 yang juga digunakan untuk pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal terhadap variabel Tingkat Kemiskinan melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi. Secara prosedural dilakukan dua tahapan, dimana tahapan pertama akan menghasilkan sebuah Persamaan tanpa adanya peran dari variabel *intervening* yaitu Pertumbuhan Ekonomi, dan tahapan kedua menghasilkan sebuah persamaan dengan adanya peran dari variabel *intervening*.

1. Hasil Pengujian Konstruk Tahap Pertama

Pengujian hipotesis tahap pertama akan menghasilkan sebuah

persamaan tanpa adanya peran dari variabel *intervening* yaitu Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (TK). Pengujian konstruk tahap pertama akan menggambarkan secara langsung bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = X1, Dana Alokasi Umum (DAU) = X2, Dana Bagi Hasil (DBH) = X3, Belanja Modal = X4 dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) = Y1 terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) = Y2.

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output path coefficients* seperti dalam Tabel 2 berikut :

Tabel 2 Hasil Pengujian Konstruk Tahap Pertama

No	Variabel	Path Koefisien	p-Value	Standard Error
1	PAD (X1) -> Tingkat Kemiskinan (Y2)	-0.712	0.001	0.108
2	DAU (X2) -> Tingkat Kemiskinan (Y2)	0.019	0.413	0.088
3	DBH (X3) -> Tingkat Kemiskinan (Y2)	0.306	0.019	0.131
4	Belanja Modal (X4) -> Tingkat Kemiskinan (Y2)	0.188	0.016	0.193
5	Pertumbuhan Ekonomi (Y1) -> Tingkat Kemiskinan (Y2)	0.139	0.036	0.192

Sumber : Olahan Data Penelitian Warp-PLS : 5, 2017.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui path koefisien masing-masing variabel yang dapat dimasukkan dalam persamaan model pertama sebagai berikut :

$$Y_1 = -0.712X_1 + 0.019X_2 + 0.306X_3 + 0.188X_4 + 0.139Y_1$$

Nilai *path koefisien* masing-masing variabel tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai *path koefisien* variabel PAD sebesar -0,712 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan nilai PAD sebesar

1 satuan maka akan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar -0,712 satuan.

2. Nilai *path koefisien* variabel DAU sebesar 0,019 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan DAU sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,019 satuan.

3. Nilai *path koefisien* variabel DBH sebesar 0,306 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan DBH sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif

terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,306 satuan.

4. Nilai *path koefisien* variabel Belanja Modal sebesar 0,188 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan Belanja Modal sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,188 satuan.
5. Nilai *path koefisien* variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,139 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,139 satuan.

Kemudian pengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel mediasi terhadap variabel dependen secara langsung seperti yang terangkum dalam Tabel 2 tersebut dapat diketahui tingkat signifikansinya, yaitu dengan membandingkan hasil nilai p-Value dengan nilai α , dimana nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0,05$. Syarat pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika nilai p-Value $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. H_0 diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan.
2. Jika nilai p-Value $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. H_0 ditolak berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Dari hasil pengolahan data dengan program Warp-PLS versi 5.0 untuk tahap pertama yang dirangkum dalam Tabel 2 diatas maka, dapat dilakukan uji hipotesis pada tahap pertama yaitu menguji pengaruh langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = X1, Dana Alokasi Umum (DAU) = X2, Dana Bagi Hasil (DBH) = X3, Belanja Modal = X4 dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) = Y1 terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) = Y2. Hipotesis penelitian yang akan diuji akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diketahui bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah negatif signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai *path koefisien* sebesar -0.712 dengan nilai p-Value sebesar $< 0,001$ yang berarti p-Value $< 0,05$ dan standar error sebesar 0.108. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, pengaruh X1 terhadap Y2 dalam penelitian ini hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diketahui bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah tidak signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai *path koefisien* sebesar 0.019 dengan nilai p-Value sebesar 0.413 yang berarti p-Value $> 0,05$ dan standar error sebesar 0.088. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, pengaruh X2 terhadap Y2 dalam penelitian ini hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan” ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diketahui bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah tidak

signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai path koefisien sebesar 0.306 dengan nilai p-Value sebesar 0.019 yang berarti p-Value < 0,05 dan standar error sebesar 0.131. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, pengaruh X3 terhadap Y2 dalam penelitian ini hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

d. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diketahui bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai path koefisien sebesar 0.188 dengan nilai p-Value sebesar 0.016 yang berarti p-Value < 0,05 dan standar error sebesar 0.193. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, pengaruh X4 terhadap Y2 dalam penelitian ini hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

e. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diketahui bahwa pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah signifikan, hal ini

dibuktikan dari nilai path koefisien sebesar 0.139 dengan nilai p-Value sebesar 0.036 yang berarti p-Value < 0,05 dan standar error sebesar 0.192. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, pengaruh Y1 terhadap Y2 dalam penelitian ini hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

2. Hasil Pengujian Konstruk Tahap Kedua

Pengujian hipotesis tahap kedua akan menghasilkan sebuah persamaan dengan adanya peran dari variabel *intervening* yaitu Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (TK). Pengujian konstruk tahap kedua akan menggambarkan secara tidak langsung bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = X1, Dana Alokasi Umum (DAU) = X2, Dana Bagi Hasil (DBH) = X3, dan Belanja Modal = X4 terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) = Y2 melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) = Y1.

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output path coefficients* seperti dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3 Hasil Pengujian Konstruk Tahap Kedua

No	Variabel					Path Koefisien	p-Value	Standard Error
1	PAD (X1)	->	PE (Y1)	->	TK (Y2)	0.466	0.017	0.195
2	DAU (X2)	->	PE (Y1)	->	TK (Y2)	0.017	0.436	0.168
3	DBH (X3)	->	PE (Y1)	->	TK (Y2)	0.288	0.257	0.439
4	BM (X4)	->	PE (Y1)	->	TK (Y2)	-0.431	0.038	0.197

Sumber : Olahan Data Penelitian Warp-PLS : 5, 2017.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui path koefisien masing-masing

variabel yang dapat dimasukkan dalam persamaan model kedua sebagai berikut :

$$Y_2 = 0.466X_1 + 0.017X_2 + 0.288X_3 - 0.431X_4$$

Nilai *path koefisien* masing-masing variabel tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai *path koefisien* variabel PAD sebesar 0,466 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan nilai PAD melalui Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,466 satuan.
2. Nilai *path koefisien* variabel DAU sebesar 0,017 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan DAU melalui Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,017 satuan.
3. Nilai *path koefisien* variabel DBH sebesar 0,288 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan DBH melalui Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,288 satuan.
4. Nilai *path koefisien* variabel Belanja Modal sebesar -0,431 mempunyai arti apabila setiap ada kenaikan Belanja Modal melalui Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka akan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar -0,431 satuan.

Kemudian pengaruh antara variabel independen melalui variabel mediasi terhadap variabel dependen secara tidak langsung seperti yang terangkum dalam Tabel 3 tersebut dapat diketahui tingkat signifikansinya, yaitu dengan membandingkan hasil nilai p-Value dengan nilai α , dimana nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0,05$. Syarat pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika nilai p-Value $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 H_0 diterima berarti terdapat pengaruh

yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi.

2. Jika nilai p-Value $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

H_0 ditolak berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi.

Dari hasil pengolahan data dengan program WarpPLS versi 5.0 untuk tahap kedua yang dirangkum dalam Tabel 3 diatas maka, dapat dilakukan uji hipotesis pada tahap kedua yaitu menguji pengaruh tidak langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) = X_1 , Dana Alokasi Umum (DAU) = X_2 , Dana Bagi Hasil (DBH) = X_3 , dan Belanja Modal = X_4 terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) = Y_2 melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) = Y_1 . Hipotesis penelitian yang akan diuji akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 3 diatas, diketahui bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah signifikan, hal ini dibuktikan dari *nilai path koefisien* sebesar 0.466 dengan nilai p-Value sebesar 0.017 yang berarti p-Value $< 0,05$ dan standar error sebesar 0.195. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, pengaruh X_1 terhadap Y_2 melalui Y_1 dalam penelitian ini hipotesis keenam yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan

Ekonomi” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 3 diatas, diketahui bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah tidak signifikan, hal ini dibuktikan dari *nilai path koefisien* sebesar 0.017 dengan nilai p-Value sebesar 0.436 yang berarti p-Value > 0,05 dan standar error sebesar 0.168. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, pengaruh X2 terhadap Y2 melalui Y1 dalam penelitian ini hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi” ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 3 diatas, diketahui bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah signifikan, hal ini dibuktikan dari *nilai path koefisien* sebesar 0.288 dengan nilai p-Value sebesar 0.027 yang berarti p-Value < 0,05 dan standar error sebesar 0.439. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, pengaruh X3 terhadap Y2

melalui Y1 dalam penelitian ini hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

d. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

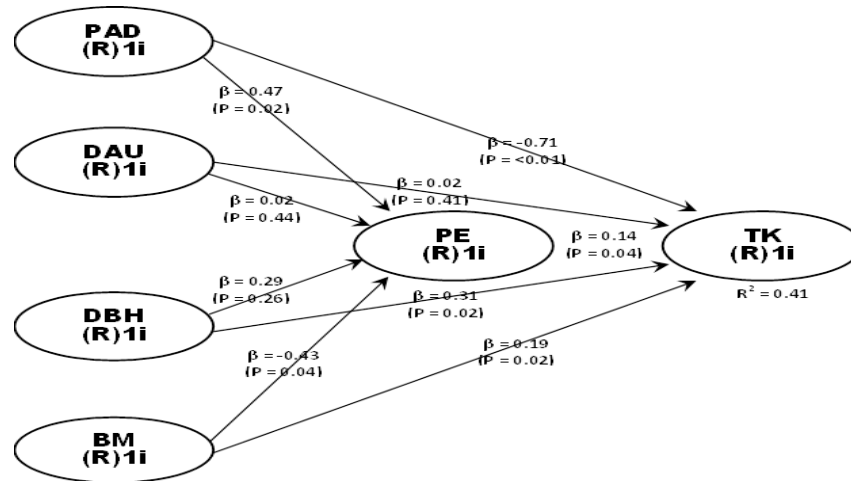
Berdasarkan Tabel 3 diatas, diketahui bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah negatif signifikan, hal ini dibuktikan dari *nilai path koefisien* sebesar -0.431 dengan nilai p-Value sebesar 0.038 yang berarti p-Value < 0,05 dan standar error sebesar 0.197. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, pengaruh X4 terhadap Y2 melalui Y1 dalam penelitian ini hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa “Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi” diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

3. Hasil Analisis Jalur (Besar Pengaruh Langsng dan Tidak Langsung)

Tahapan pengujian analisis jalur dimaksudkan untuk menguji besarnya kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal (BM) terhadap Tingkat

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA PADA TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2015

Kemiskinan melalui variabel analisis jalur dapat digambarkan 4 Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengujian sebagai berikut :



Gambar 4 Model dan Output Analisis

Dari diagram analisis jalur seperti terlihat pada Gambar 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah :
 - a. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $0,466^2 \times 100\% = 21,7\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial cukup besar dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, karena Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat 21,7% dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif jika dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk pembangunan didaerahnya yang dikelola secara efektif dan efisien.
 - b. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah sebesar $-0,712^2 \times 100\% = 50,7\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial cukup besar dalam mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, karena Tingkat Kemiskinan akan dapat ditekan 68,89% dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau jika dialokasikan untuk pembangunan didaerahnya dan dikelola secara efektif dan efisien.

- c. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $(0,466 + 0,139)^2 \times 100\% = 34,2\%$. Sehingga kontribusi total variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 34,2%.

2. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah :
 - a. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $0,017^2 \times 100\% = 0,03\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial sangat kecil dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, karena Pertumbuhan Ekonomi hanya akan meningkat 0,03%. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang positif yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau jelas tidak dialokasikan untuk pembangunan didaerahnya walaupun dialokasikan jumlahnya sangat kecil sekali sehingga tidak berdampak terhadap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi.
 - b. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah sebesar $0,019^2 \times 100\% = 0,04\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial sangat kecil dalam mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, karena Tingkat Kemiskinan hanya akan turun 0,04%. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang positif yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau jelas tidak dialokasikan untuk program-program pembangunan guna mengentaskan Kemiskinan didaerah walaupun dialokasikan jumlahnya sangat kecil sekali sehingga tidak berdampak terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - c. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $(0,017 + 0,139)^2 \times 100\% = 2,2\%$. Sehingga kontribusi total variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 2,2%.
3. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah :
 - a. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $0,288^2 \times 100\% = 8,3\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial relatif kecil dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, karena Pertumbuhan Ekonomi hanya akan meningkat 8,3%. Dengan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang positif yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau jelas tidak dialokasikan untuk pembangunan didaerahnya walaupun dialokasikan jumlahnya kecil sehingga tidak berdampak besar terhadap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi.
 - b. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan adalah sebesar $0,306^2 \times 100\% = 9,4\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial kecil dalam mempengaruhi

- Tingkat Kemiskinan, karena Tingkat Kemiskinan hanya akan turun 9,4%. Dengan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang positif yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau jelas tidak dialokasikan untuk program-program pembangunan guna mengentaskan Kemiskinan di daerah walaupun dialokasikan jumlahnya kecil sehingga tidak berdampak besar terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan.
- c. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $(0,288 + 0,139)^2 \times 100\% = 18,2\%$. Sehingga kontribusi total variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 18,2%.
4. Kontribusi langsung dan tidak langsung pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan adalah :
- a. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $-0,431^2 \times 100\% = 18,6\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Belanja Modal secara parsial tidak terlalu besar dalam mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, karena Pertumbuhan Ekonomi hanya akan meningkat 18,6%. Dengan adanya Belanja Modal yang positif yang dialokasikan dalam APBD oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa Belanja Modal kurang besar yang dialokasikan untuk Belanja Modal Langsung yang berdampak pada pembangunan di daerahnya walaupun dialokasikan jumlahnya kecil sehingga tidak berdampak besar terhadap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi.
 - b. Besarnya kontribusi langsung pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan adalah sebesar $0,188^2 \times 100\% = 3,53\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Belanja Modal secara parsial sangat kecil dalam mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, karena Tingkat Kemiskinan hanya akan turun sebesar 3,53%. Dengan adanya Belanja Modal yang positif yang dialokasikan dalam APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal kurang besar yang dialokasikan untuk Belanja Modal Langsung yang berdampak pada pengentasan kemiskinan di daerahnya walaupun dialokasikan jumlahnya kecil dan tidak langsung kepada program-program yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga hal ini tidak berdampak besar terhadap upaya penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - c. Adapun besarnya kontribusi tidak langsung pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar $(-0,431 + 0,139)^2 \times 100\% = 8,5\%$. Sehingga kontribusi total variabel Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 8,5%. Penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dapat dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5 Rangkuman Besar Kontibusi Langsung dan Tidak Langsung PAD, DAU, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengaruh Variabel	Pengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan		Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.507		0.507
Dana Alokasi Umum (DAU)	0.004		0.004
Dana Bagi Hasil (DBH)	0.094		0.094
Belanja Modal (BM)	0.353		0.353
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	0.139		0.139
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.342	0.342
Dana Alokasi Umum (DAU)		0.022	0.022
Dana Bagi Hasil (DBH)		0.182	0.182
Belanja Modal (BM)		0.085	0.085

Sumber : Olahan Data Penelitian Warp-PLS : 5, 2017.

langsung

Dari Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung yang paling besar terhadap Tingkat Kemiskinan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengaruh total sebesar -0,507 atau 50,7%. Sedangkan pengaruh yang paling kecil terhadap Tingkat Kemiskinan adalah variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pengaruh total sebesar 0,004 atau 0,04%.

Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel mediasi (*intervening*) cukup berperan penting dalam meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Belanja Modal dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan, namun kurang berperan dalam meningkatkan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap menurunkan Tingkat Kemiskinan. Dari hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa peran Pertumbuhan Ekonomi lebih dominan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap menurunkan

Tingkat Kemiskinan dibandingkan dengan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal terhadap menurunkan Tingkat Kemiskinan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
4. Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
5. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki pengaruh yang

- signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
7. Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
 8. Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
 9. Belanja Modal melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
 10. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel mediasi (*intervening*) cukup berperan penting dalam meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan, namun tidak berperan dalam meningkatkan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemiskinan.
 11. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel mediasi (*intervening*) lebih dominan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan dibandingkan dengan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka dapat direkomendasikan sejumlah saran sebagai berikut :

1. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebaiknya pemerintah daerah lebih fokus dalam upaya meningkatkan sumber-sumber yang berpotensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- sehingga tidak terlalu bergantung pada Dana Perimbangan melalui DAU dan DBH dalam membiayai operasional daerah dan sebagai modal dalam pembangunan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan dan alokasinya untuk program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dalam APBD melalui Belanja Modal Langsung perlu ditingkatkan dan dikelola secara efisien dan efektif agar tepat sasaran sehingga dapat langsung menyentuh tingkat kesejahteraan rakyat demi mengentaskan kemiskinan.
 3. Melihat pengaruh DAU dan DBH terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi yang tidak terlalu besar tetapi memiliki keterkaitan maka sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi anggaran DAU dan DBH yang dialokasikan dalam anggaran Belanja Modal Langsung yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang akan berdampak pada penurunan Tingkat Kemiskinan.
 4. Melihat adanya pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi maka sebaiknya pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Daerah dalam APBD lebih memprioritaskan Belanja Modal Langsung yang bersifat produktif seperti belanja infrastruktur sehingga dapat lebih meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan.
 5. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis, lebih lanjut diharapkan :

- Menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, DAK, maupun variabel non keuangan seperti tingkat pengangguran, dan IDM.
- Lebih memperluas cakupan pada objek penelitian dan memperpanjang periode waktu penelitian (periode tahun amatan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo, Hadi, 2012, Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Jurnal Interdisipliner UKSW*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah, 2007, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4, No. 2, hal. 211-228. Universitas Trunojoyo, Semarang.
- Andri, Devita, Arman Delis dan Junaidi, 2014, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 2 No. 2, Oktober-Desember.
- Budi, Santoso, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Pada 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol. 5, No. 2, Juli. Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Survei Sosial Ekonomi Nasional*, September.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau*
- Ghozali, Imam. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hendarmin, 2012, Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Halim, Abdul, 2008, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Jolianis, 2016, Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada

- Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel *Intervening*, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4 No.2 (34-57). STKIP- PGRI Sumbar.
- Mulyanto, 2007, Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi, *Jurnal Region*, Vol., 2., No., 1., Januari : 43-52
- Meilen, Gleri, Paseki, Amran. Naukoko, Patrick, Wauran, 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 14 no. 3 – Oktober. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mawarni, Darwanis, dan Guntur Hendriwiyanto, 2013, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- Nopirin, 2011, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nurmainah, 2013, Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis* *Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, No. 71 Tahun 2010, tentang Belanja Modal.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang pada tahun 2015 direvisi untuk selanjutnya menjadi UU No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Santi, Nurmainah. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskina (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. September. Hal. 131 – 141 Vol. 20. No. 2 131. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Simanullang, S. P., 2013, *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE, Unibraw, Malang.
- Todaro M. P and S. C. Smith, 2008, *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 9, Alih Bahasa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tarigan, Robert. 2010. *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Cetakan kedua. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Tri Hartitik, 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011 *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. September. Hal. 13-41 Vol. 2. No. 2. Universitas Diponegoro. Semarang.

Wandira, Widjaja, 2013, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

World Bank Institute, 2007, *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Wahyuni dan Priyo 2009, Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali), *National Conference UKWMS*, Surabaya

Yulianis, 2016, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010), *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. UNDIP, Semarang.